



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA

GEDUNG SYAFRUDDIN PRAWIRANEGARA II L.T. 11 UTARA JL. LAPANGAN BANTENG TIMUR 2-4, JAKARTA 10710
TELEPON (021)3449230 ext 4601; FAKSIMILE (021) 3442948; SITUS www.djkn.depkeu.go.id

Nomor : S-059/KN.2/2013
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Identifikasi dan Pendataan serta Pelaksanaan
Program Percepatan Sertifikasi Barang Milik
Negara Berupa Tanah Pada Kementerian/Lembaga

18 Maret 2013

- Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah V DJKN Bandar Lampung
2. Kepala Kantor Wilayah IX DJKN Semarang
3. Kepala Kantor Wilayah X DJKN Surabaya
4. Kepala Kantor Wilayah XI DJKN Pontianak
5. Kepala Kantor Wilayah XIII DJKN Samarinda

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Sebagaimana Saudara maklum, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Barang Milik Negara (BMN) yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Bersama Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.06/2009 dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah, dijelaskan lebih lanjut bahwa BMN berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian/Lembaga yang menguasai dan/atau menggunakan Barang Milik Negara.
2. Dalam rangka percepatan sertifikasi BMN berupa tanah di Kementerian/Lembaga, dapat kami informasikan bahwa untuk tahun 2013 telah ditetapkan 2.000 bidang tanah sebagai target program percepatan pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah yang pendanaannya berada di DIPA Badan Pertanahan tahun 2013. Program ini diharapkan akan terus berlanjut di tahun mendatang.
3. Penetapan target program percepatan pelaksanaan sertifikasi dimaksud dengan mendasarkan pada data aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendataan Tanah Pemerintah (SIMANTAP) yang disampaikan kepada kami di tahun 2012. Dalam kaitan ini, kami sampaikan apresiasi atas kerja sama Saudara yang telah melakukan identifikasi dan pendataan BMN berupa tanah dimaksud pada tahun 2012.
4. Berkenaan dengan target program sebanyak 2.000 bidang tanah di tahun 2013 tersebut, dapat kami sampaikan bahwa dengan pertimbangan keterbatasan pembiayaan, kelengkapan data serta adanya pembatasan kriteria dan persyaratan target, maka untuk tahun 2013 belum terdapat bidang tanah di satuan kerja Kementerian/Lembaga di wilayah kerja Saudara yang menjadi target program dimaksud.
5. Selanjutnya, untuk mendukung kelanjutan pelaksanaan percepatan sertifikasi tersebut di tahun mendatang, kami harapkan kerja sama Saudara untuk terus mengupayakan dan memaksimalkan kegiatan identifikasi dan pendataan BMN berupa tanah berbasis program aplikasi SIMANTAP dengan memastikan seluruh satuan kerja di wilayah kerja Saudara sudah menginput BMN berupa tanah ke dalam aplikasi SIMANTAP.

Demikian...//02

ik

6. Menindaklanjuti surat kami Nomor S-010/KN.2/2013 tanggal 11 Januari 2013 hal Program Sertifikasi Barang Milik Negara Berupa Tanah Tahun Anggaran 2013 dan mengingat bahwa tidak terdapat bidang tanah satuan kerja di wilayah kerja Saudara yang menjadi target program percepatan sertifikasi di tahun 2013, maka dengan pertimbangan efisiensi biaya dan efektivitas penggunaan anggaran kiranya Saudara dapat mengoptimalkan anggaran yang ada untuk kegiatan identifikasi dan pendataan BMN di wilayah propinsi masing-masing.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur



A Dedi Syarif Usman
NIP. 19650422 199203 1 003 1



Tembusan Yth.:

1. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
2. Sekretaris DJKN;
3. Para Kepala KPKNL di lingkungan Kantor Wilayah bersangkutan.